

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM MEMINIMALISASI KREDIT MACET

(Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang).

Iven Agatha Christy

Kertahadi

Achmad Husaini

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

E-mail: ivenagatha@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dan pengawasan Kredit Usaha Rakyat untuk meminimalisasi kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan kredit pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan pengawasan kredit, dan Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah dalam 3 (tiga) periode, yaitu 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2012 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang. Hasil penelitian adalah kebijakan kredit yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia yang tertuang pada Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) cukup baik dan sudah berpedoman pada standar Bank Indonesia, namun dalam penerapannya terdapat beberapa kelemahan dalam beberapa aspek. Kelemahan yang ditemukan adalah kurangnya tenaga *Account Officer* (AO), adanya perangkapan tugas *Account Officer*, tidak adanya fungsi *Supervisor Unit*, kurangnya frekuensi audit internal, serta kurang optimalnya kegiatan pembinaan debitur.

Kata kunci : Kebijakan Kredit, Pengawasan, Kredit Usaha Rakyat

Abstract

The purpose of this study is to investigate the implementation of credit policy and credit monitoring conducted by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Sub Branch Tanjungrejo Malang. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The focus of this research is focused on the implementation of the credit policy on granting procedures Public Credit, credit monitoring, and Public Credit that have problem on 3 (three) periods, ie December 31, 2010 till December 31, 2012 at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Sub Branch Tanjungrejo Malang. The results of this study is credit policy that have been made by Bank Rakyat Indonesia as called Guidelines for Implementation of Micro Business Loans is quite good and has been guided by the standard of Bank Indonesia, but in practice there are some weaknesses in some aspects. Weakness that have found are the lack of Accounts Officer (AO), Accounts Officer that have much tasks, don't have function of Supervisor Unit, the lack frequency of internal audit, as well as less optimal development activities debtor.

Keywords: Credit Policy, Monitoring, Public Credit

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi yang baik untuk berkembang, namun seiring perkembangannya memiliki permasalahan keuangan yang cukup pelik dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Perbankan sebagai sektor keuangan mempunyai peranan yang penting untuk penyaluran dana antara debitur dan kreditur. Begitu pentingnya peran bank, maka ada

anggapan bahwa bank ibarat mesin, tanpa bank roda perekonomian tidak dapat berjalan.

Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah satunya dapat dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). "Peran bank sebagai perantara keuangan dengan melakukan

penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian” (Rivai dan Veithzal, 2007:2). Kontribusi bank yang sangat besar yaitu menyalurkan dana bagi masyarakat sebagai pengguna jasa bank, dana tersebut dalam istilah perbankan disebut kredit.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Undang-Undang Perbankan 10, 1998). Bank mengandalkan pemberian kredit sebagai sumber pendapatan laba yang utama disamping aktivitas pelayanan lainnya, karena dalam pemberian kredit bank mendapat pengembalian bunga dari setiap jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah.

Salah satu jenis kredit berdasarkan penggunaannya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat adalah program kredit lunak dari pemerintah berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang usahanya layak (*feasible*) namun tidak mempunyai agunan cukup sesuai dengan besar pinjaman dan belum *bankable* (www.bri.co.id). Adanya Kredit Usaha Rakyat ini diharapkan dapat membangkitkan peran UMKM untuk menunjang pembangunan produktivitas ekonomi. “Bank melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang ada pada debitur dalam menyalurkan kredit, yaitu faktor 5C yang meliputi *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *conditional* (kondisi) dan *collateral* (jaminan)” (Kasmir, 2012:101).

Pengawasan dalam pemberian kredit merupakan fungsi manajemen yang penting. Kegiatan pengawasan merupakan aktivitas penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan/diinvestasikan di bidang perkreditan. Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa analisis kredit sesuai dengan prosedur, data nasabah benar sesuai dengan proposal permohonan kredit, jumlah kredit yang diberikan benar sesuai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diperoleh tersebut, dan juga ketepatan tanggal pembayaran oleh nasabah.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang adalah salah satu unit BRI yang menyalurkan kredit mikro. Salah satu jenis kredit mikro yang disalurkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang menyalurkan fasilitas KUR bagi nasabah untuk memenuhi modal kerja nasabah dengan plafon sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang tergolong dalam jenis KUR mikro. Menurut peraturan Bank Indonesia, bank konvensional harus dapat mempertahankan tingkat NPL (*Non Performing Loan*) selalu rata-rata dibawah 5% tiap tahunnya dan masih dibawah batas yang ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 5%.

Tabel 1. Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) PT. BRI Unit Tanjung Rejo Malang

No.	Tahun	Total Kredit Bermasalah (Rp)	Total Kredit Disalurkan (Rp)	NPL %
1.	Des 2010	300.856.450	11.545.000.000	2,60%
2.	Des 2011	423.721.000	12.680.000.000	3,34%
3.	Des 2012	552.837.000	14.255.000.000	3,88%

Sumber : PT. BRI Unit Tanjung Rejo Malang

Berdasarkan Tabel 1, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang merupakan salah satu bank konvensional yang dapat mempertahankan tingkat NPL selalu rata-rata dibawah 5% tiap tahunnya dan masih dibawah batas yang ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 5%. Hal tersebut berdasarkan kebijakan pemberian kredit dan pengawasan kredit yang terarah sesuai dengan asas perkreditan yang sehat, agar tidak terjadi kredit macet atau kredit bermasalah yang dapat merugikan pihak bank. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi kebijakan kredit dan pengawasan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meminimalisasi kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang.

KAJIAN PUSTAKA

Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Pengertian atau definisi tentang kredit menurut Undang-undang No.10/1998 (pasal 21 ayat 11) adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “Kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”. UMKM-K yang dimaksud adalah usaha produktif layak, yakni jika hasil usahanya diperkirakan mampu untuk membayar pokok pinjaman dan bunga sampai lunas. “Usaha telah *feasible* namun belum *bankable* (usaha yang sudah berjalan namun masih mempunyai keterbatasan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank)” (Malano, 2011:201).

Kebijakan Kredit

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat secara konsisten, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa: “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”.

Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah “Kegiatan pengawasan/*monitoring* terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya” (Suhardjono, 2003:230). Pengertian pengawasan kredit lainnya adalah “Usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet” (Hasibuan, 2005:105). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan kredit harus dilakukan oleh pejabat kredit bank agar tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan pihak bank.

Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci

untuk menilai kinerja fungsi bank dan kesehatan kualitas *asset* bank. Penilaian kualitas *asset* merupakan penilaian terhadap kondisi *asset* bank dan kecukupan manajemen risiko kredit (www.bi.go.id). Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Jenis kolektibilitas yang termasuk dalam tunggakan kredit atau kredit bermasalah adalah pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Fokus penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan kredit pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan pengawasan kredit, dan Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah dalam 3 (tiga) periode, yaitu 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2012 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan kredit pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang.
2. Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang dalam meminimalisasi terjadinya kredit macet.
3. Mengevaluasi tingkat kredit bermasalah yang terjadi selama 3 (tiga) periode yaitu periode tahun 2010 sampai dengan 2012 berdasarkan jumlah kredit yang disalurkan dengan menggunakan rumus Non Performing Loan (NPL).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Kredit pada Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang

Bank Indonesia memiliki standar tentang pedoman pembuatan kebijakan kredit bagi Bank Umum yaitu yang tertuang dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Tbk Unit Tanjungrejo Malang sebagai salah satu Unit dari Bank Umum yang terpercaya memiliki pedoman kebijakan kredit yang tertuang pada Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM). Namun dalam penerapannya terdapat beberapa kelemahan dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada perkreditan dan organisasi perkreditan

Penerapan prinsip kehati-hatian yang tertuang pada PPK-BM mencakup pembuatan kebijakan pokok perkreditan, tatacara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Yang terakhir yang juga berpengaruh sangat penting adalah terdapat pejabat perkreditan yang kompeten yang akan memproses kredit. Dalam rangka mempertahankan sistem dan prosedur pemberian kredit yang baik, maka terdapat pemisahan pejabat kredit pada organisasi perkreditan berdasarkan bidang tugasnya. Adanya perangkapan tugas pada jabatan *Account Officer* merupakan salah satu penyimpangan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur perkreditan.

“Tugas *Account Officer* adalah *Credit Analyst*, penilai jaminan (*Appraisal*), *Surveyor*, serta melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan debitur” (wawancara dengan Bapak Imanuel selaku Mantri pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang). Perangkapan tugas *Account Officer* tersebut mengakibatkan kinerja *Account Officer* kurang maksimal, selain itu apabila dibiarkan terus berlanjut akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict interest*) antara *Account Officer* dan calon debitur atau debitur. Selain itu berdasarkan prinsip pengendalian intern, pemisahan fungsi jabatan juga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan oleh pejabat kredit. Sehingga perlu adanya pengurangan dan pemindahan sebagian tugas *Account Officer* dengan membentuk fungsi *Credit Recovery*, yang berperan menangani kredit setelah kredit tersebut dicairkan dan menyelesaikan adanya kredit bermasalah.

2. Pengawasan dan Pembinaan Kredit

Menurut kebijakan kredit yang berlaku, obyek pengawasan dan pembinaan kredit adalah setiap pejabat kredit BRI dan kredit yang disalurkan. Kegiatan pengawasan dan pembinaan kredit harus dilakukan secara

teratur dan berkesinambungan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bank, namun dalam pelaksanaannya kegiatan pengawasan dan pembinaan debitur jarang sekali dilakukan, hanya bersifat insidental pada saat terjadi permasalahan saja. Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bank, perlu ditingkatkan frekuensi kunjungan ke debitur dalam rangka pengawasan dan pembinaan debitur.

Audit internal adalah salah satu kegiatan pengendalian intern terhadap kinerja pejabat kredit BRI. Kurangnya frekuensi audit internal dari Kanwil menyebabkan lemahnya fungsi pengendalian intern yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang. Sebaiknya audit internal dilakukan secara mendadak setiap 3 (tiga) bulan sekali, agar mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan penerapan kebijakan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang.

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kredit dalam Meminimalisasi Terjadinya Kredit Macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang dalam rangka usaha memperkecil risiko kredit dari kredit yang telah disalurkan melakukan pengawasan kredit sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku, dalam hal ini tertuang dalam PPK-BM. Namun dalam pelaksanaan pengawasan kredit tersebut terdapat beberapa kekurangan, antara lain:

1. Inspeksi On The Spot (OTS)

Pelaksanaan inspeksi on the spot hanya pada saat terjadi keterlambatan pembayaran atau terjadi penunggakan saja dan frekuensinya kurang teratur. Sebaiknya kunjungan ke tempat debitur dilaksanakan minimal tiap 1 (satu) bulan sekali secara mendadak guna mendapatkan informasi secara riil tentang kondisi debitur, yaitu mengenai kondisi usaha debitur dan keberadaan jaminan. Hal tersebut guna mengetahui secara dini permasalahan atau gejala timbulnya kredit bermasalah, sehingga pihak bank dapat membantu mencari solusi atas permasalahan tersebut.

2. Pembinaan debitur

Pembinaan terhadap debitur selama ini kurang optimal. Kegiatan pembinaan debitur jarang sekali dilakukan. Sebaiknya kegiatan pembinaan dilakukan secara

berkesinambungan setelah kredit dicairkan. Frekuensi kunjungan untuk pembinaan perlu ditingkatkan misalnya minimal 1 (satu) bulan sekali. Hal ini bertujuan agar usaha debitur lancar dan pada akhirnya dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Selain itu pembinaan terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah dapat membantu debitur tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, misalnya mencari solusi bagaimana mengelola kembali usahanya yang sempat mengalami kemunduran, sehingga dapat menaikkan warna kredit bermasalah debitur tersebut.

3. Account Officer

“Jumlah tenaga *Account Officer* atau disebut Mantri yang menangani Kredit Usaha Rakyat hanya ada 2 (dua) staff” (wawancara dengan Bapak Moch. Nasir selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Malang). Minimnya jumlah tenaga *Account Officer* bertentangan dengan banyaknya jumlah calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit sejak diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat tersebut pada tanggal 5 November 2007 lalu, rata-rata setiap harinya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang terdapat 5-7 calon debitur, sedangkan proses pemberian kredit harus cepat agar realisasi kredit juga cepat terlaksana. Hal yang diketahui masyarakat selama ini adalah Kredit Usaha Rakyat yang diperkenalkan pemerintah adalah kredit yang membutuhkan syarat sederhana dengan proses yang cepat. Tetapi dengan kurangnya tenaga yang menangani pengajuan KUR, maka proses pencairannya menjadi lama. Hal ini apabila diabaikan akan menyebabkan masyarakat menjadi kecewa dengan pelayanan Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Malang dan secara tidak langsung akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Malang.

4. Supervisor Unit

Fungsi Supervisor Unit adalah mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan operasional. Apabila melihat struktur organisasi, pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang tidak terdapat fungsi Supervisor Unit, hal tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan kurang maksimal, karena fungsi tersebut juga berperan

penting karena dapat membantu Kepala Unit dalam hal pengawasan.

Analisis Kredit Macet Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang

Perhitungan persentase kredit macet atau kredit bermasalah dapat menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL) dan mengamati dan menganalisis laporan kredit bermasalah selama tiga (3) periode yaitu pada periode yang berakhir pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah kredit bermasalah. NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja keuangan bank dan kesehatan likuiditasnya. Bank Indonesia menetapkan batas besarnya NPL yang baik adalah sebesar 5%. Pihak bank harus berupaya semaksimal mungkin agar tingkat NPL tidak melebihi 5%.

Hasil dalam penelitian ini terdapat golongan kredit bermasalah yaitu kolektibilitas kredit Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Dapat disimpulkan bahwa kenaikan total KUR yang disalurkan diikuti pula dengan kenaikan total KUR bermasalah yang pada akhirnya berdampak pada besarnya NPL. Terbukti pada tahun 2010 total KUR yang disalurkan sebesar Rp. 11.545.000.000,00 dengan total KUR bermasalah sebesar Rp. 300.856.450,00 serta NPL sebesar 2,60%. Pada tahun 2011 terdapat kenaikan yaitu total KUR yang disalurkan sebesar Rp. 12.680.000.000,00 diikuti dengan pertambahan KUR bermasalah menjadi Rp. 423.721.000,00 serta kenaikan NPL menjadi sebesar 3,34%. Kenaikan juga terus berlanjut sampai tahun 2012 yaitu dapat dilihat bahwa total KUR yang disalurkan sebesar Rp. 14.255.000.000,00 dan KUR bermasalah sejumlah Rp. 552.837.000,00 serta kenaikan NPL menjadi 3,88%.

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan besarnya NPL KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang tiap tahunnya masih berada dibawah batas aman yaitu dibawah standar BI sebesar 5%, namun apabila diamati dari periode tahun 2010 sampai dengan 2012 besarnya NPL terus naik tiap tahunnya. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang harus ditingkatkan lagi untuk meminimalisir besarnya NPL agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan perkreditan yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit-Bisnis Mikro (PPK-BM) sudah cukup baik, namun pada pelaksanaannya terdapat kekurangan. Secara umum, hal tersebut karena kurangnya tenaga *Account Officer*, selain itu juga terdapat penyimpangan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam hal pemisahan tugas *Account Officer*. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang kurang optimal. Kegiatan pengawasan dan pembinaan hanya dilakukan pada saat terjadi keterlambatan atau penunggakan saja, sehingga tingkat kredit macet belum dapat diminimalisir.

Pengawasan kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang kurang optimal karena tidak adanya fungsi *Supervisor* Unit dan kurangnya audit internal secara mendadak dari Kanwil. Faktor-faktor penyebab kredit macet yaitu adanya bencana alam yang menimpa debitur, mundurnya usaha yang dijalankan debitur, itikad tidak baik dari debitur, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta adanya persepsi yang keliru mengenai pemahaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Saran

Mengingat pentingnya fungsi *Account Officer* atau Mantri dalam kegiatan perkreditan maka perlu diadakan penambahan jumlah Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang agar kegiatan perkreditan berjalan maksimal dan efisiensi waktu.

Perlu dilakukan pemisahan tugas dalam fungsi jabatan *Account Officer* (AO) yang bertugas sebagai *Credit Analyst*, penilai jaminan (Appraisal), *Surveyor*, serta melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan debitur. Tugas tersebut dapat dikurangi dan dipindah ke jabatan *Credit Recovery* yang berperan menangani kredit setelah pencairan kredit dan menyelesaikan adanya kredit bermasalah, sehingga kinerja AO dapat lebih optimal dan juga berdasarkan prinsip pengendalian intern. Adanya pemisahan tugas dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan oleh pejabat kredit karena konflik kepentingan (*conflict interest*) antara AO dan calon debitur. Penambahan fungsi Supervisor Unit agar dapat lebih mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan

operasional pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang.

Perlunya sosialisasi pihak bank yang menerangkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 yang diberikan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum pernah mendapat kredit perbankan sebelumnya dan penyaluran KUR ini tidak cuma-cuma, namun hanya mendapat penjaminan dari lembaga penjaminan seperti PT. Askrindo. Hal tersebut agar tidak terjadi kredit macet yang disebabkan adanya persepsi yang keliru di masyarakat tentang KUR.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan kredit perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan frekuensi yang rutin setelah kredit tersebut dicairkan. Hal tersebut guna mengenali permasalahan kredit secara dini dalam hal mencari solusi atas permasalahan tersebut, serta dapat meminimalisir terjadinya kredit macet atau dapat menaikkan warna kredit. Selain itu, perlu penambahan frekuensi audit internal dari Kanwil, misalnya setiap 3 (tiga) bulan sekali agar dapat mengetahui adanya penyimpangan dalam penerapan kebijakan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
<http://www.bi.co.id>
<http://www.bri.co.id>
Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 Hal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMP.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR.
Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veitzhal. 2007. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR Tanggal 3 Maret 1995. "Syarat Permohonan Kredit", diakses pada tanggal 25 April 2013 dari <http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/>

Lampiran14-PedomanPerhitungan
RasioKeuangan.PDF.

Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.